

BAB II

PERKEMBANGAN MENTALITAS NEGERI TENGAH (*MIDDLE KINGDOM*) DAN KETEGANGAN KONTEMPORER TIONGKOK-TAIWAN ERA XI JINPING

Bab ini terdiri dari dua sub-bab mendalami perkembangan konsep Negeri Tengah, dari eksistensinya di era kekaisaran Tiongkok melalui pola *tributary system*, sampai era kontemporer melalui relasi *strategic periphery* yang mana terbentuk dengan Taiwan atas dasar *Tianxia*. Sub-bab kedua bagian awal membahas hubungan Taiwan dan Tiongkok era Ma Ying Jeou dilanjutkan pembahasan ketegangan signifikan Tiongkok dan Taiwan era Tsai Ing Wen dan Presiden Xi Jinping yang asertif dengan adanya upaya determinasi diplomatik dan militeristik sebagai usaha legitimasi satu Tiongkok. Bab ini penting, guna untuk memperlihatkan keberadaan konsep Negeri Tengah dengan pola hubungan khususnya *tianxia*, *strategic periphery* dan *tributary system* dalam dominasi Tiongkok atas Taiwan melalui determinasi diplomatik dan militeristik.

2.1 Perkembangan Mentalitas Negeri Tengah (*Middle Kingdom*)

Tiongkok adalah salah satu negara yang memiliki ikatan mengakar dengan historis dalam berbagai perjalanannya. Dimana menempatkan sejarah sebagai sesuatu yang memiliki relevansi, sebab dibayangi ingatan kolektif tentang penyesalan dan amarah, hal ini selaras dengan karakteristik kebudayaan Asia Timur yaitu “the persistence of pre-modern ways of thinking” (Jacques, 2009).

Referensi historis digunakan oleh Tiongkok dalam menyusun kebijakan politik luar negerinya, tetapi seringkali dilaksanakan secara tidak sadar, sebab sudah menjadi entitas dari identitas bangsa (Dessein, 2009).

Oleh sebab itu aspek historis menjadi penting memahami identitas Tiongkok, dalam memahami karakteristik Tiongkok era kontemporer. Identitas Tiongkok sebagai sebuah bangsa dibentuk dengan berbagai pengalaman sejarah ribuan tahun. Identitas tersebut membentuk suatu mentalitas serta pola pikir. Identitas Tiongkok yang mana menempatkan dirinya sebagai pusat kebudayaan dan peradaban dunia memiliki kekuatan untuk membentuk perspektif orang-orang diluar domain Tiongkok. Identitas tersebut, membentuk manifestasi konsep budaya unggul yang kemudian membentuk nasionalisme Tiongkok (Schneider, 2014). Identitas sebagai sebuah bangsa dengan budaya unggul mempengaruhi cara pandang Tiongkok terhadap dirinya sendiri dan tatanan global secara menyeluruh.

Konsep sejarah yang berkaitan dengan identitas dan mentalitas tersebut adalah Negeri Tengah (*Middle Kingdom*). Mentalitas sebagai Negeri Tengah menempatkan kepercayaan Tiongkok adalah negara yang unggul baik secara konteks budaya dan ras (Jacques, 2009). Konteks keunggulan tersebut memberikan justifikasi untuk Tiongkok dalam rangka melakukan ekspansi dalam fase kekaisarannya ribuan tahun yang lalu. Konsep mentalitas sebagai Negeri Tengah juga mendapat pengaruh dari prinsip tradisional sebagai inti atau pusat, dimana yang disebut sebagai *Chung Kuo* (Garnet, 1996). Tiongkok secara naluri memandang dirinya sendiri sebagai sebuah negara besar (Lanteigne, 2009).

Dalam bahasa Mandarin, Tiongkok disebut *Zhongguo* yang berarti Negeri Tengah. Konsep *Zhongguo* berakar dari manifestasi kepercayaan ketika fase dinasti Zhou (1066 SM-221M) yang memandang bahwa Tiongkok sebagai pusat peradaban dunia (French, 2017). Negeri Tengah di dalam interpretasi, bahwa Tiongkok memiliki teritorial kekuasaan yang disebut *tributary states* dan dipercaya menguasai seluruh dunia (Zhao, 2006).

Sejarah peradaban Tiongkok dalam teritori sekelilingnya terdapat kelompok yang disebut periphery (Dikotter, 2015). Manifestasi Tiongkok sebagai negara inti dan wilayah lain sebagai pinggiran (*periphery states*) yang selanjutnya membentuk relasi hirarkis. Estimasi dalam kurun waktu 2000 tahun Tiongkok memmanifestasikan dirinya *Tianxia* “penguasa alami atas tanah bawah surga” all under heaven (French, 2017). Dimana Tiongkok diberikan titah tuhan dalam rangka menjalankan peradaban yang unggul dan maju dengan dasar nilai-nilai konfusianisme dan moral (Zhao, 2004). Dalam hal relasi Tiongkok, memposisikan hubungan hirarkis yang disebut “*tributary system*”.

Menurut Akademisi William Callahan terdapat empat narasi berbeda dalam menarasikan peradaban Tiongkok, pertama *Zhongguo* atau Tiongkok sebagai entitas negara-bangsa dengan teritori serta batas-batas wilayah. Kedua, *Da Zhongguo* yaitu metafora penaklukan dimana menjelaskan konteks ekspansi kekaisaran Tiongkok. Dalam fase modern narasi kedua ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Tiongkok dengan tujuan mengembalikan teritorialnya yang hilang atau lepas dan memperbaiki fase “abad penghinaan”.

Ketiga adalah Da Zhong Huayang ditafsirkan bentuk upaya Tiongkok untuk merubah kelompok lain untuk dapat tunduk atau mengikuti Tiongkok yang unggul. Keempat adalah proses diaspora identitas Tiongkok melalui berbagai kebijakan melalui Chinese Diaspora. Konteks narasi diatas memunculkan keunggulan Tiongkok dimana pada akhirnya membentuk pola Sinocentrism dalam hubungan Tiongkok dengan dunia sampai sekarang (Callahan, 2004).

Selain itu Akademisi Martin Jacques berargumen yang sama dengan William Callahan, menyebutkan terdapat empat narasi berbeda yang berapada dalam peradaban Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) Tiongkok. (1) Zhongguo yang berarti Tiongkok sebagai negara teritorial yang bersifat ke dalam atau defensif dan Tiongkok berusaha untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, (2) Da zhongguo yang berarti Tiongkok sebagai penakluk dalam artian Tiongkok bertindak dengan doktrin ekspansionis dalam kebijakan politik luar negerinya, (3) Da ZhongHua yang berarti Tiongkok bersifat merubah dimana dapat dikatakan bertindak sebagai revisionis, Tiongkok memiliki kecenderungan untuk memandang dirinya superior dan Tiongkok sebagai pembangun identitas. *Tributary System* fundamen utama pola hubungan Tiongkok dan negara lain, yang di sekitar wilayahnya dan tidak sedominan Tiongkok. Pola tersebut telah terjadi sejak era Dinasti Han (206 SM-220 M) yang meliputi aspek seperti ekonomi, politik, ideologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang terjadi antara negara inti pusat peradaban (*core*) Tiongkok dan negara, wilayah-wilayah pinggiran *peripheral* (Chan, 2013).

Manifestasi dalam karakteristik sistem tributary adalah ukuran Tiongkok harus lebih besar yang akan membuat lebih dominan, selain itu penerimaan dan aspek pengakuan oleh negara dan wilayah-wilayah terhadap keunggulan Tiongkok (Jacques, 2009). Penafsiran awal negara-negara pinggiran yaitu domain negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografis dengan Tiongkok, atau dapat disebut negara-negara dan wilayah kawasan Asia Timur. Dalam fase perkembangannya interpretasi negara, wilayah pinggiran mulai berkembang.

Dalam pola sistem tributary, negara-negara pinggiran harus memberikan penghormatannya kepada kekaisaran Tiongkok sebagai bentuk pengakuan serta penerimaan akan rasa keunggulan. Tiongkok sebagai Negeri Tengah sebagai timbal balik akan memberikan hadiah, kemudahan akses perdagangan, dan menjalin kerjasama, tetapi sebaliknya jika tidak melakukan pengakuan serta penerimaan akan rasa unggul maka sebagai Negeri Tengah (*Middle Kingdom*), Tiongkok memberikan penekanan melalui militer, diplomatik, dan ekonomi (Feurwerker, 1972). Sebagai *Tianxia*, Tiongkok hal penyatuan kekuasaan dan kekuatan dalam domain politik domestik serta internasional menjadi aspek yang sangat krusial, sebab teritori yang ada di bawah kekuasaan Tiongkok akan terus dipertahankan jika tidak akan di eliminir dengan cara-cara determinasi militer, diplomatik (Ford, 2010). Sebab Tiongkok terdapat prinsip Tiga Harmoni, yaitu heping “mewujudkan perdamaian dunia”, he-jie “rekonsiliasi dengan Taiwan”, dan hexie “mewujudkan masyarakat domestik yang harmonis” (Yuliantoro, 2021).

Penerapan ini, berkembang menjadi sebuah tradisi dalam konteks pengakuan atas keunggulan Tiongkok. Melalui hal tersebut Tiongkok berusaha mempertahankan status quo sebagai Negeri Tengah, dengan melakukan berbagai kebijakan serta prinsip yang wajib dipatuhi oleh negara, wilayah yang tergabung dalam pola relasi ini.

Konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) merupakan tesis dari nilai-nilai Konfusianisme, dalam sudut pandang konfusianisme, aspek *Tianxia* memiliki maksud politik untuk unifikasi seluruh tanah dibawah surga (Dessein, 2014). Hubungan berbasis relasi dimana menempatkan Tiongkok sebagai Negeri Tengah merupakan aspek ajaran dari konfusianisme dimana mengutamakan tatanan sosial, tanggung jawab, dan hirarkis (Fairbank, 1969).

Perkembangan, konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) mengalami fase kemerosotan di akhir abad ke-18. Meskipun telah hadir selama ribuan tahun, konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) sebagai manifestasi kekuasaan universal mengalami demoralisasi oleh kekuatan Barat di Asia Timur. Manifestasi kepercayaan Tiongkok sebagai pusat dunia mulai goyah, dimana akhirnya terpaksa membuka kontak hubungan dengan dunia luar pada tahun 1850-an (Spence, 1999). Tiongkok memasuki fase *century of humiliation* “fase penghinaan” dimana dalam hal ini mengubah polarisasi hubungan Tiongkok dengan negara, wilayahsekitarnya. Dimana tidak terdapat manifestasi Negeri Tengah, abad penghinaan ini berjalan sejak fase Perang Opium tahun 1840 sampai invasi Jepang pada tahun 1945.

Tributary system yang sebelumnya memberikan legitimasi terhadap Tiongkok perlahan melemah, ditambah dengan masifnya negara-negara pinggiran ke arah perkembangan. Tiongkok fase tersebut mengalami konfrontasi kekuatan negara Barat dalam aspek militer, ekonomi, teknologi, sosial dan politik. Fase tersebut merupakan periode dimana konteks Negeri Tengah yang secara fundamen menjadi bargain Tiongkok memudar serta dihinakan (Ford, 2010).

Akan tetapi fase tersebut, tidak menghilangkan konsep mentalitas Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) begitu saja. Perjalanan rekonstruksi Tiongkok sebagai Republik. Aktor reformis dan nasionalis akhir abad ke 19 seperti Xu Jiyu, Liang Qichao, Li Hong Zhang, dan terutama Yun Yat Sen tidak selaras dengan gagasan komunitas global berdasarkan hirarkis Tiongkok sebagai core nya. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa perbedaan karakteristik manifestasi bahwa peradaban historis Tiongkok superior merupakan suatu hal yang dipertahankan (Ford, 2010).

2.1.1 Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) fase Mao Zedong

Penerapan konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) juga terjadi dalam fase Mao Zedong (1949-1976). Tiongkok saat itu dalam keadaan kesulitan adaptasi dengan tatanan barat. Proses adaptasi yang sulit tersebut, disebabkan Tiongkok merasa sudah memiliki tatanan global yang di metamorfosis dari historis kolektif sebagai Negeri Tengah (French, 2017). Konteks ini, kemudian menyebabkan kebijakan politik luar negeri Tiongkok era Mao Zedong cenderung orientasi epistemik seperti peristiwa Revolusi Kebudayaan tahun 1966-1976. Meskipun demikian, Tiongkok fase Mao Zedong tetap melihat Taiwan sebagai fokus utama.

Sebab dalam tiga prinsip harmoni, prinsip he-jie yaitu penyatuan Taiwan merupakan telaah utama. Dalam beberapa kutipan Mao Zedong membahas mengenai Tiongkok dalam kaitannya sebagai pusat kekuasaan (*tianxia*), *strategic periphery*, dan *tributary system* atas Taiwan,. Dibuktikan dengan pernyataan langsung dari Mao Zedong pada konferensi partai komunis Tiongkok tahun 1958 dan peringatan hari nasional tahun 1966.

“ Republik Rakyat Tiongkok tidak akan pernah pantang menyerah dalam segala upaya dan usahanya untuk menyatukan Taiwan dengan tanah air kesatuan kita, hal ini merupakan kewajiban kita terhadap generasi mendatang ” (Morwood, 1980).

“ Penyatuan kembali Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian integral dalam perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan nasional dan kedaulatan penuh ” (Morwood, 1980).

“ Kami (Tiongkok) siap untuk menggunakan segala cara yang diperlukan termasuk (militeristik) dalam mencapai penyatuan kembali dengan Taiwan ” (Morwood, 1980).

Pada masa Mao Zedong, hubungan Tiongkok dan Taiwan sangat tegang. Setelah kekalahan Kuomintang (KMT) dalam Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan KMT melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok (ROC). Mao menekankan klaim Tiongkok atas Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan.

Bentrokan militer: Beberapa insiden militer terjadi, seperti Krisis Selat Taiwan pada tahun 1954–1955 dan 1958, ketika Tiongkok mengebom pulau-pulau yang dikuasai Republik Tiongkok di dekat Taiwan. Retorika politik: Mao terus menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok, meski tujuan utamanya tetap konsolidasi kekuatan internal di daratan Tiongkok (Morwood, 1980).

Menelaah berdasar argumen di atas, hal ini termasuk dalam salah satu aspek dalam konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) yaitu *Tianxia* dimana Tiongkok sebagai pusat kekuasaan dan kedaulatan. Kemudian menjelaskan bahwa upaya integral dimana Taiwan merupakan bentuk *strategic periphery*.

Serta Tiongkok dengan dalih menyatukan Taiwan memungkinkan akan memakai penetrasi secara militeristik merupakan bentuk *tributary system* akibat dari penolakan Taiwan atas kekuasaan utama Tiongkok atas Taiwan yang merupakan bagian *strategic periphery*.

2.1.2 Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) fase Deng Xiaoping

Pada saat era pemerintahan Deng Xiaoping berbeda dengan Mao, pendekatan secara aspek ideologis dalam kebijakan dan hubungan luar negeri mulai dihilangkan perlahan. Dimana menempatkan Tiongkok low-profile untuk pembangunan ekonomi, stabilitas ekonomi dan rekonstruksi domestik, Tiongkok memprioritaskan legitimasi internasional dengan puncaknya kebijakan ‘One China Policy’ tahun 1979. Selain menjalin hubungan dengan negara Afrika dan Asia untuk hubungan jangka panjang dan menerapkan cross-regional diplomacy dalam kebijakan luar negerinya (Lanteigne, 2009).

Setelah modernisasi ekonominya, Tiongkok mengalami kebangkitan, hal ini kemudian disadari pemimpin Tiongkok dan berbagai dinamika. Momentum tersebut secara eksplisit tidak menempatkan Tiongkok dalam posisi yang bagus, sebab Tiongkok dalam fase mengembalikan konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dalam spektrum global.

Kebijakan fase Deng Xiaoping cenderung pragmatis dalam menghadapi Taiwan dan dunia internasional, dimana pernah mengatakan tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang terpenting bisa menangkap tikus. Meskipun demikian Tiongkok fase Deng Xiaoping tetap melihat Taiwan sebagai salah satu fokus utama. Dalam hal penyatuan Taiwan selaras dengan Mao Zedong meskipun tidak terlalu asertif. Hal ini masih sesuai dengan salah satu dari tiga prinsip harmoni Tiongkok yaitu *he-jie* (penyatuan Taiwan). Dalam beberapa kutipan Deng Xiaoping membahas mengenai Tiongkok dalam kaitannya sebagai pusat kekuasaan *tianxia*, *strategic periphery*, dan *tributary system* atas Taiwan,. Dibuktikan dengan pernyataan langsung dari beberapa kutipan Deng Xiaoping dalam pidato kongres rakyat nasional 1983, peringatan Republik Rakyat Tiongkok tahun 1984 dan wawancara dengan wartawan luar negeri tahun 1986.

“ *Tiongkok telah menjadi pusat kekuasaan yang penting di dunia,penyatuan kembali Taiwan akan dapat memperkuat posisi kami di ranah internasional* ” (mofa, 2012).

“ *Penyatuan kembali dengan Taiwan penting untuk integritas nasional Tiongkok, sebab memiliki implikasi strategis, sebab Taiwan bagian dari rantai periphery strategis kita* ” (mofa,2012)

“ *Tiongkok selalu berupaya untuk penyatuan kembali dengan Taiwan melalui cara damai, jika ada upaya memisahkan Taiwan dari Tiongkok, kami tidak akan segan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial kami* ” (mofa, 2012).

Deng Xiaoping mengambil pendekatan yang lebih pragmatis terhadap hubungan Sino-Taiwan, sejalan dengan kebijakan reformasi dan keterbukaan di daratan Tiongkok. Kebijakan satu negara, dua sistem : Deng mengusulkan model "satu negara, duasisitem" di mana Taiwan akan mempertahankan sistem politik dan ekonominya sendiri setelah reunifikasi dengan Tiongkok. Konsep ini pertama kali diterapkan di Hongkong dan Makau. Diplomasi : Meski tetap menegaskan klaimnya terhadap Taiwan, Deng lebih fokus pada pengembangan perekonomian Tiongkok dan peningkatan hubungan diplomatik internasional, termasuk normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Taiwan (Vogel, 2012).

Menelaah berdasar argumen di atas, hal ini termasuk dalam salah satu aspek dalam konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) yaitu *Tianxia* dimana Tiongkok sebagai pusat kekuasaan dan kedaulatan. Kemudian menjelaskan bahwa upaya integral dimana Taiwan merupakan bentuk *strategic periphery*. Serta Tiongkok dengan dalih menyatukan Taiwan memungkinkan akan memakai penetrasi secara militeristik merupakan bentuk *tributary system* akibat dari penolakan Taiwan atas kekuasaan utama Tiongkok atas Taiwan yang merupakan bagian *strategic periphery*.

2.1.3 Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) fase Xi Jinping

Sejak era Xi Jinping, secara implisit konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) muncul, dimana diiringi kekuatan dan tekad Tiongkok di bawah Xi Jinping dalam rangka mewujudkan Chinese Dream. Xi Jinping melakukan manifestasi untuk mengembalikan kekuatan Tiongkok yaitu Tianxia dengan identitas serta mentalitas Negeri Tengah (Lanteigne, 2009). Xi Jinping, selain itu juga memiliki visi mewujudkan peremajaan nasional “The Great Rejuvenation”, dimana mengembalikan kedudukan tradisional Tiongkok sebagai kekuatan regional, satu Tiongkok, serta global yang cukup dominan (Rachman, 2017).



Gambar 2.1 Pidato Peremajaan Nasional Xi Jinping
Source : The Guardian, 2018

Mengacu pada gambar 2.1 fase kepemimpinan Presiden Xi Jinping implementasi konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) terejawantahkan dalam peremajaan nasional yang dimana Taiwan menjadi fokus utama. Sesuai dengan salah satu prinsip tiga harmoni yaitu he-jie (penyatuan Taiwan).

Selain presiden Xi Jinping, menteri pertahanan Tiongkok Don Jun dalam acara Dialog Shangri La 2024 di Singapura secara eksplisit menyebutkan bahwa penyatuan Taiwan dalam satu Tiongkok menjadi hal yang tidak terelakan. Demikian juga tidak akan segan menggunakan tindakan menggunakan kekuatan militer. Kebijakan fase Xi Jinping cenderung asertif dalam menghadapi Taiwan dan dunia internasional. Demikian Tiongkok fase Xi Jinping melihat Taiwan sebagai salah satu fokus utama yang juga masuk dalam the great rejuvenation.

Dalam hal penyatuan Taiwan selaras dengan pendahulu-pendahulunya terkhusus Mao Zedong dan Deng Xiaoping, meskipun terlalu asertif. Hal ini masih sesuai dengan salah satu dari tiga prinsip harmoni Tiongkok yaitu he-jie (penyatuan Taiwan). Dalam beberapa kutipan Xi Jinping membahas mengenai Tiongkok dalam kaitannya sebagai pusat kekuasaan (*tianxia*), *strategic periphery*, dan *tributary system* atas Taiwan,. Dibuktikan dengan pernyataan langsung dari beberapa kutipan Xi Jinping dalam peringatan hari nasional tahun 2023, konferensi keamanan internasional tahun 2023.

“ Sebagai pusat kekuasaan, Tiongkok memiliki tanggung jawab besar memastikan stabilitas, penyatuan kembali Taiwan dapat memperkuat peran kita sebagai pemimpin panggung internasional ”

“ Taiwan merupakan bagian integral dari Tiongkok, penyatuan Tiongkok merupakan kepentingan strategis untuk stabilitas regional dan global. Taiwan memiliki peran penting dalam periphery strategiskami ”

“ *Tiongkok akan terus memainkan peranan utama, penyatuan kembali Taiwan akan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin strategis di wilayah ini, dan kami siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk mencapai tujuan ini* ”

Menelaah berdasar argumen di atas, hal ini termasuk dalam salah satu aspek dalam konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) yaitu *Tianxia* dimana Tiongkok sebagai pusat kekuasaan dan kedaulatan. Kemudian menjelaskan bahwa upaya integral dimana Taiwan merupakan bentuk *strategic periphery*.

Tiongkok dengan dalih menyatukan Taiwan memungkinkan akan memakai penetrasi secara militeristik merupakan bentuk *tributary system* akibat dari penolakan Taiwan atas kekuasaan utama Tiongkok atas Taiwan yang merupakan bagian *strategic periphery* dalam *Tianxia*. Implementasi Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) era Xi Jinping yang lebih mendalam akan dijelaskan dalam sub-bab di bawah.

2.2 Ketegangan Kontemporer Tiongkok dan Taiwan Era Xi Jinping

Tahun 2013 Xi Jinping terpilih sebagai Presiden Tiongkok, pada tahun 2015 Xi Jinping dan Ma Ying Jeou menggelar pertemuan di Singapura sebagai bentuk pembahasan satu Tiongkok berdasarkan konsensus tahun 1992. Akan tetapi fase tersebut tidak berlangsung lama. Hubungan Tiongkok dan Taiwan berjalan fluktuatif, pergantian era dari Ma Ying Jeou ke Tsai Ing Wen dari partai progresif demokratik hubungan bilateral Tiongkok dan Taiwan mengalami polarisasi. Dimana tidak adanya kesempatan dan pembicaraan terkait saling meningkatkan kepercayaan dan persetujuan dalam kerjasama ekonomi dan terkhusus pemahaman satu Tiongkok (VOA Indonesia, 2016).

Dalam pidato tahun baru tahun 2013, Presiden Ma Ying Jeou menyampaikan secara eksplisit terkait hubungan Taiwan dengan Tiongkok terhadap Xi Jinping berharap dapat menjalin kerjasama dalam rangka mendorong pembangunan perdamaian merujuk Konsensus 1992 terkait aspek satu Tiongkok yang ditawarkan oleh Beijing (mac, 2013). Di tahun 2013, Presiden Xi Jinping menjabat, dimana Taiwan yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Ma Ying Jeou ingin menjalin hubungan yang harmonis untuk menjaga stabilitas lintas selat.

Tahun 2014 Presiden Ma Ying Jeou menyampaikan bahwa membangun hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang erat dalam Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi (ECFA) merupakan bentuk menjaga stabilitas lintas selat (eastasiaforum, 2014). Dalam agenda peringatan pendirian nasional tahun 2015 Presiden Ma Ying Jeou menyampaikan tiga arti penting yaitu Rekonsiliasi, Kerjasama, dan Perdamaian. Dimana akan menjaga perdamaian lintas selat berdasarkan Konsensus 1992 dalam kerangka kerjasama yang baik (mac, 2015).

Tahun 2016, Presiden Ma Ying Jeou menyebutkan bahwa Konsensus 1992 merupakan bagian integral dari status quo. Menjelaskan bahwa Konsensus 1992 sebagai fundamen dialog bagi Tiongkok dan Taiwan mencapai hubungan damai lintas selat (mac, 2016).

Ketika terjadi pergantian rezim ke Tsai Ing Wen mengambil sikap dingin terhadap Tiongkok tahun 2016 akhir setelah resmi menjadi Presiden Taiwan, hal ini dipengaruhi oleh Partai Progresif Demokratik partai asal Tsai Ing Wen yang memiliki orientasi politik lepas dari pengaruh Beijing (scmp, 2016).

Sedangkan di era presiden Ma Ying-Jeou sepakat dengan konsensus 1992 dimana Taiwan setuju dengan terdapatnya satu Tiongkok untuk menjaga perdamaian serta stabilitas lintas selat, sedangkan era Tsai Ing-Wen menolak konsensus tersebut, sebab jika setuju maka kedepan akan terjadinya ketergantungan yang akan membatasi kedaulatan Taiwan di masa depan.



Gambar 2.2 Penegasan Presiden Tsai Ing Wen atas satu Tiongkok
Sumber : South China Morning Post, (2019)

Mengacu pada gambar 2.2 Presiden Taiwan yaitu Tsai Ing Wen secara eksplisit menyebut bahwa menolak prinsip satu Tiongkok yang ditawarkan oleh Presiden Xi Jinping. Ketegangan terkhusus Tiongkok dan Taiwan sangat berpengaruh terhadap kawasan Asia Timur dan global, relasi keduanya mengalami titik didih ketika rezim Tsai Ing-Wen naik tampuk kekuasaan. Pergantian kekuasaan Taiwan dari Ma Ying-Jeou ke Tsai Ing-Wen tahun 2016 berpengaruh terhadap hubungan dengan Tiongkok (Kristin Huang, 2021). Tiongkok era Xi Jinping menerapkan agresivitas diplomacy terhadap Taiwan.

Hal tersebut sebagai bentuk komunikasi politik ditunjukkan bahwa kebijakan “One China Policy” merupakan harga mutlak Beijing. Hubungan Tiongkok dan Taiwan era Presiden Xi Jinping berada dalam fase yang cukup sarat akan konflik langsung dan konflik urat syaraf (implisit). Memasuki tahun 2016 sampai dengan 2023, era Tsai Ing Wen sebagai pemimpin Taiwan serta tahun 2024 era Lai Ching-Te, Tiongkok memainkan kebijakan luar negeri yang menekankan penekanan militer dan diplomatik. Dimana militer terhadap Taiwan dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang menjalin hubungan dengan Taiwan. Tiongkok memandang Taiwan sebagai satu kesatuan yang memisahkan diri dan pada akhirnya akan berada dalam kendali mereka. Tetapi berbeda dengan Taiwan yang menganggap bahwa mereka bukan bagian Tiongkok sebab memiliki konstitusi dan pemimpin yang dipilih secara demokratis. Konteks relasi dengan Taiwan sangat krusial bagi Tiongkok sebab Taiwan memiliki relasi dengan Amerika Serikat.

Tiongkok memiliki anggapan bahwa dengan adanya prinsip “One China Policy” Taiwan harus tunduk baik secara eksplisit maupun implisit sebagai satu kesatuan dengan kebijakan Tiongkok (Bush, 2017, hal. 3).

Tahun 2022, Tiongkok mengeluarkan buku putih yang berjudul “Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi Tiongkok di Era Baru” Buku putih tersebut, merupakan keluaran ketiga. Dimana buku putih pertama tahun 1993 tentang pertanyaan Taiwan dan reunifikasi Tiongkok. Tahun 2000 tentang prinsip satu Tiongkok dan masalah Taiwan. Sejak Tsai Ing-wen menjabat sebagai Presiden Taiwan pada tahun 2016, respons dan tindakan Taiwan terhadap kebijakan Satu Tiongkok yang diusung Presiden Xi Jinping.

Presiden Tsai Ing-wen melakukan penolakan terhadap Kebijakan Satu Tiongkok, Tsai Ing-wen dan partai yang dipimpinnya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara konsisten menolak kebijakan Tiongkok yang dipromosikan oleh Beijing. Tsai tidak mengakui konsensus tahun 1992 bahwa ada “satu Tiongkok,” meskipun ada interpretasi yang berbeda mengenai hal ini.

Memperkuat Identitas Taiwan Pemerintahan Tsai mendorong penguatan identitas nasional Taiwan dan meningkatkan upaya memperkuat kedaulatan dan posisi Taiwan sebagai entitas terpisah dari Tiongkok. Fokusnya tidak hanya pada pendidikan dan kebudayaan Taiwan, tetapi juga pada penguatan demokrasi dan hak asasi manusia.

Tsai Ing Wen ingin memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan politik pada Tiongkok. Tsai juga berupaya memperluas partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional meskipun ada tekanan dari Beijing. Peningkatan Pertahanan Pemerintahan Tsai Ing Wen telah meningkatkan anggaran pertahanan Taiwan secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan militer dalam menghadapi potensi ancaman dari Tiongkok. Taiwan juga membangun kerja sama pertahanan yang lebih erat dengan Amerika Serikat, termasuk pembelian senjata canggih dan latihan militer gabungan. Respon terhadap tekanan dari Tiongkok, Presiden Tsai Ing Wen menghadapi peningkatan tekanan dan intimidasi dari Tiongkok, termasuk peningkatan aktivitas militer di sekitar Taiwan, perang psikologis, dan kampanye disinformasi.

Tsai menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan status quo damai di Selat Taiwan, tetapi juga memperingatkan bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada tekanan. Lai Ching Te sebagai wakil presiden dan mantan perdana menteri di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen, sekarang Lai Ching-te menjadi presiden terpilih mendukung pendekatan Tsai terhadap kebijakan Satu Tiongkok.

Beberapa poin penting tentang tindakan dan posisinya dengan peningkatan Identitas Taiwan pemerintahan Lai Chiang-te mendukung dan mendorong penguatan identitas nasional Taiwan dan menganjurkan kebijakan yang memperkuat posisi Taiwan sebagai negara yang terpisah dari Tiongkok.

Lai Chiang-te sangat mendukung kedaulatan Taiwan dan menentang kebijakan Satu Tiongkok. Dia sering mengidentifikasi dirinya sebagai pejuang kemerdekaan Taiwan. Kebijakan ekonomi dan perdagangan sebagai perdana menteri, Lai fokus pada penguatan ekonomi domestik Taiwan dan diversifikasi hubungan perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Tiongkok. Hubungan dengan Amerika Serikat Presiden Lai Chiang-te secara aktif mendukung dan memperkuat hubungan diplomatik, ekonomi, dan pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok.

Secara keseluruhan, meskipun ada tekanan dari Beijing, dari tahun 2016 hingga 2024, baik Tsai Ing-wen maupun Lai Ching-te mengambil sikap tegas terhadap kebijakan Satu Tiongkok dan berupaya memperkuat identitas, kedaulatan, dan keamanan Taiwan. Dalam buku putih tahun 2022, terdapat empat bagian, pertama Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan Taiwan fakta yang tak terbantahkan, kedua upaya tegas PKC untuk mewujudkan reunifikasi Tiongkok

seutuhnya, ketiga reunifikasi nasional erabaru, dan keempat prospek cerah untuk reunifikasi damai (china-embassy, 2022). Tetapi terdapat hal berbeda, Tiongkok secara resmi menyatakan akan lebih keras terhadap Taiwan dimana tidak menyebutkan “reunifikasi secara damai” dalam laporan resi Perdana Menteri Li Qiang dalam pembukaan kongres rakyat nasional (Tian, 2024).



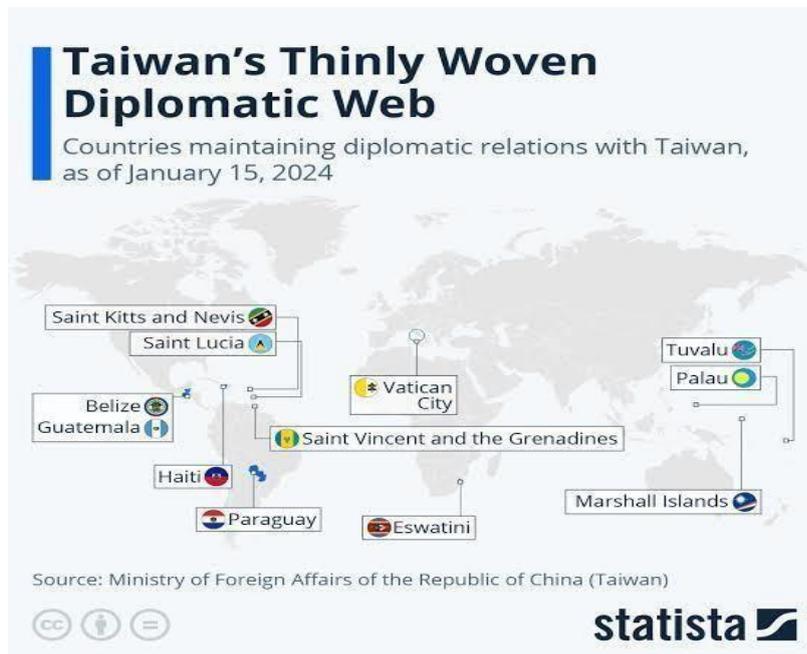
Gambar 2.3 Presiden Xi Jinping menegaskan penggunaan kekuatan
Sumber : South China Morning Post, (2019)

Mengacu pada gambar 2.3 Presiden Xi Jinping secara eksplisit menyebutkan bahwa Tiongkok tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam menegaskan posisinya atas Taiwan. Selama ini Tiongkok melihat Taiwan sebagai gerombolan separatis yang mendapat dukungan pihak lain. Tiongkok mengupayakan penyatuan Taiwan dalam satu Tiongkok harus dicapai dengan segala cara. Presiden Xi Jinping sendiri, dalam reunifikasi lintas selat dengan Taiwan, tidak akan mengesampingkan penggunaan kekerasan. Pada 22 September 2022, menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa Taiwan merupakan inti dari kepentingan politik luar negeri mereka seiring terwujudnya peremajaan nasional (fmprc, 2022).

Data negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dari tahun 2016 sampai dengan 2024 ;

NEGARA	TAHUN	FAKTOR
Sao Tome and Principe	2016	Taiwan tidak memenuhi kebutuhan dan bantuan keuangan.
Panama	2017	Tiongkok mitra dagang dan pengguna terusan Panama terbesar
Reublik Dominika	2018	Tiongkok memberikan bantuan investasi sebesar \$3,2 miliar untuk tujuh proyek
Burkina Faso	2018	Tiongkok memberikan bantuan untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
El Salvador	2018	El Salvador menandatangani dokumen perjanjian mitra dagang dengan Tiongkok.
Solomon Island	2019	Tiongkok memberi dana pembangunan.
Kiribati	2020	Kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, investasi, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Nicaragua	2021	Tiongkok memberikan bantuan investasi dalam bagian Belt and Road Initiative senilai \$3 triliun
Honduras	2023	Tiongkok memberikan bantuan dan kerjasama di bidang keuangan dan perdagangan.
Nauru	2024	Tiongkok memberikan bantuan ekonomi dan pembangunan.

Tabel 2.1 Negara-Negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok
Source : (Diolah oleh peneliti).



Gambar 2.4 Negara-negara yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan
Source : Statista, (2024).

Mengacu gambar 2.4 Taiwan dewasa hanya sedikit negara yang mengakui legitimasinya. Berdasarkan data diatas analisa dari penulis hal ini merupakan bagian dari pada bentuk hukuman terhadap Taiwan. Sebab boikot diplomatik Tiongkok atas Taiwan merupakan bentuk implementasi dari tujuan satu Tiongkok (*Tianxia*), menempatkan Taiwan sebagai bagian strategis penting untuk menunjukkan pentingnya posisi Taiwan terhadap Tiongkok (*strategic periphery*), dan pengucilan Taiwan untuk memperlemah posisi Taiwan dengan jalur diplomatik sebagai bentuk hukuman atas kepentingan legitimasi satu Tiongkok yang masih diupayakan atas dasar tidak patuhnya Taiwan atas kedaulatan dan kekuasaan Tiongkok itu sendiri (*tributary system*). Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menyatakan bahwa Beijing berusaha untuk menekan dan mengurangi kehadiran internasional Taiwan (Reuters, 2021).

Edward Chen I-hsin, profesor ilmu politik di Chinese Culture University Taipei, menyatakan bahwa Beijing akan terus memberikan tekanan diplomatik terhadap Taiwan. Tekanan militeristik Tiongkok terhadap Taiwan.

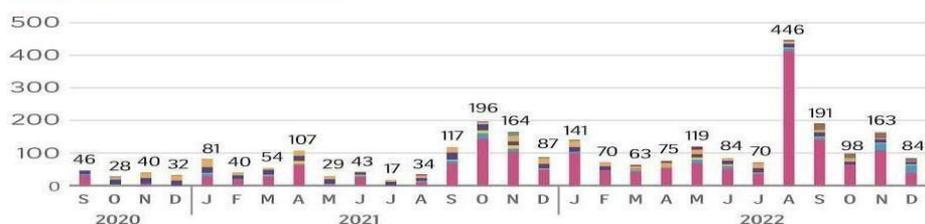
Chinese military jets over Taiwan's air defence zone

Activity since September 2020

Flights from mainland China, as at Dec 13, 2022
By aircraft type



Incursions by month



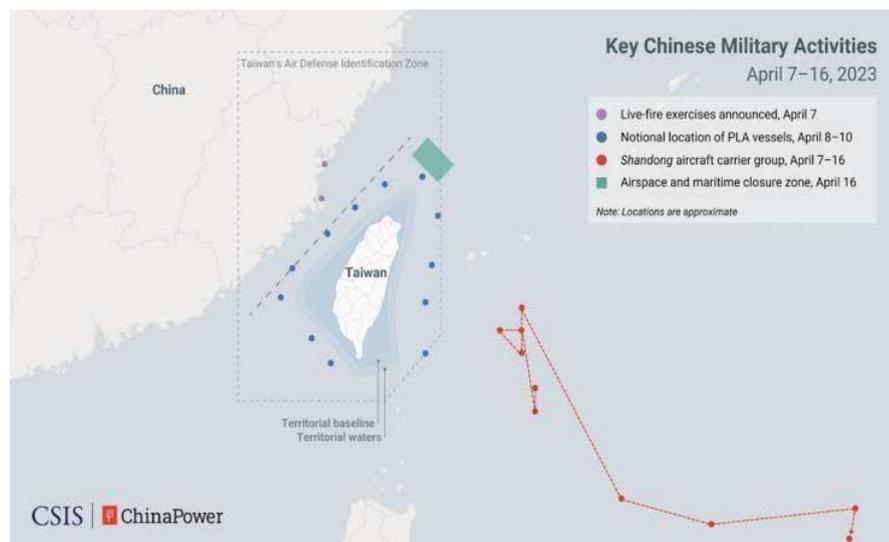
Gambar 2.5 Penetrasi People Liberation Army (PLA) tahun 2020 sampai 2023 terhadap Taiwan.

Source : Asian Military Review, (2023).

Mengacu pada gambar 2.5 Tekanan Tiongkok terhadap Taiwan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020, mengalami fluktuatif di tahun 2021 dan peningkatan di pertengahan tahun 2022 mengalami signifikansi. Tekanan secara militer oleh Tiongkok selalu melanggar zona pertahanan udara Taiwan (ADIZ). Tahun 2020 terdapat latihan militer di sebelah utara dan selatan selat Taiwan dimana dalam aktivitas militer tersebut Tiongkok melakukan manuver mendadak dimana Jet Tempur Tiongkok melanggar zona kedaulatan Taiwan tercatat bulan Agustus tahun 2020 terdapat 25 jet tempur dan pembom Tiongkok berpatroli di Selat Taiwan (Huang Kristin, 2021). Tahun 2021 tercatat 14 jet tempur J-16 dan J-11, bomber H-6 pembawa bom melintas Selat Taiwan (Economist, 2021).

Kemudian tahun 2022, operasi latihan militer di beberapa zona wilayah Taiwan dimana meliputi latihan gabungan angkatan udara, laut dan udara serta diwarnai penembakan uji coba rudal konvensional di sebelah timur lepas pantai Taiwan serta 22 Jet Tempur Tiongkok melintasi garis median selat Taiwan (DW, 2022).

Selain itu, tahun 2022 PLA menggelar operasi anti kapal selam dan operasi serangan laut di sekitar selat Taiwan selama 72 jam. Militer Tiongkok (PLA) meningkatkan determinasi provokatif serta destabilisasi di sekitar selat Taiwan, dengan penerbangan rudal balistik ke zona identifikasi pertahanan udara ADIZ yang dinyatakan oleh Taiwan. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan (MND), PLA menerbangkan total 1.737 pesawat ke zona ADIZ, dimana jumlah tersebut meningkat sebesar 79 persen dari total 972 serangan di tahun 2021, serta awal agustus 2022, 13 kapal angkatan laut beroperasi dekat selat (us taiwan defense, 2023).



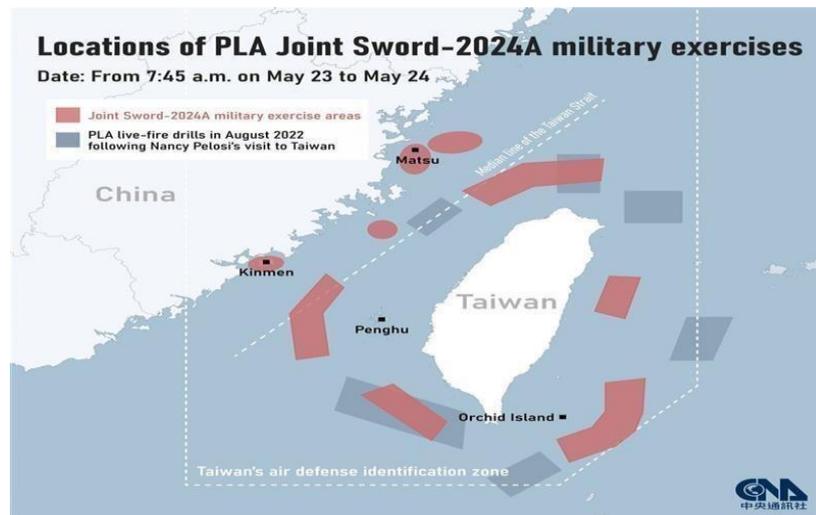
Gambar 2.6 Aktivitas agresif militer Tiongkok tahun 2023 terhadap Taiwan
Source : China Power Project CSIS, (2023).

Mengacu pada gambar 2.6 Militer Tiongkok (PLA) dalam tahun 2023 khususnya bulan april melakukan tekanan yang cukup mengejutkan dimana mengerahkan kekuatan secara signifikan. Dalam peristiwa ini, angkatan laut dan angkatan udara PLA membentuk formasi melingkar dalam gambar 2.17 ditandai warna biru dari bagian utara, tengah dan selatan.



Gambar 2.7 Peluncuran misil balistik terhadap Taiwan
Source : China Power Project CSIS, (2023).

Mengacu pada gambar 2.7 Tiongkok dalam bulan agustus tahun 2023, melepaskan 4 misil balistik terhadap Taiwan. Misil tersebut diarahkan sebagian besar ke sisi bagian utara dan selatan teritori Taiwan. Hal ini terjadi setelah adanya kunjungan Nancy Pelosi yang merupakan representasi AS, yang seringkali disebut Presiden Xi Jinping sebagai pihak eksternal yang membantu Taiwan. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk memperjelas Taiwan akan mendapat beban hukuman (Nicholas, 2023).



Gambar 2.8 Penetrasi militer Tiongkok (PLA) tahun 2024
Source : Focus Taiwan, (2024).

Mengacu gambar 2.8 Tekanan militer Tiongkok bulan Mei tahun 2024 secara signifikan dalam zona dengan cakupan yang lebih dekat dan luas. Dalam tekanan ini, memfokuskan sebagian besar kekuatan di zona teritorial selatan. Hal ini terjadi setelah pidato Presiden baru Taiwan Lai Te Ching yang bergesekan dengan kepentingan Tiongkok dengan mengutip konstitusi Taiwan yang menyatakan tidak akan tunduk dengan Tiongkok (Nicholas, 2024).

Dalam sebelas tahun kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok memperkokoh pendirian atas Taiwan. Tiongkok tahun 2024 akan meningkatkan anggaran militer sebesar 7,2 %, hal ini meningkat dua kali (Tian, 2024). Gambaran analisis diatas, menjelaskan bahwa Tiongkok menjalankan dua taktik yaitu penekanan secara militer terhadap Taiwan secara langsung dan tekanan secara diplomatik dengan melakukan intervensi negara-negara yang pada awalnya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan berubah memutus hubungan.

Dalam kongres partai ke 20 tahun 2022, Presiden Xi Jinping mengupayakan penyatuan dimana tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan sebagai bentuk pilihan. Tiongkok meningkatkan tekanan politik dan militer atas Taiwan setelah merilis buku putih ketiga dimana penyatuan merupakan landasan nation rejuvenation dalam satu negara, dimana penggunaan kekerasan diperlukan. Karakteristik Tiongkok yang terkadang defensif dan ekspansionis ini merupakan pengaruh dari konsepsi ying dan yang Taoisme dimana menjadi salah satu unsur pembentuk mentalitas Middle Kingdom, tindakan ekspansi teritorial kedaulatan merupakan sebuah bentuk evolusi progresif dalam rangka menuju takdir kesatuan yang tidak terelakkan (Jacques, 2009).

Bab ini telah menjabarkan peranan aspek historis dalam politik luar negeri Tiongkok, terkhususnya konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dalam pola hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Konsep ini terkait mentalitas dan identitas yang mempengaruhi bagaimana Tiongkok dalam melihat posisinya, yaitu sebagai pusat peradaban dan kebudayaan yang unggul, serta aktor lain dalam tatanan dunia.

Konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) telah ada sejak zaman kekaisaran Tiongkok, dimana sempat dalam fase pasang surut, tetapi eksistensinya tidak hilang seutuhnya. Jika di masa lampau manifestasi dalam sebuah pola *relasi tributary system*, dimana dalam fase ini konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) dapat digambarkan dalam berbagai usaha Tiongkok untuk dapat mengembangkan pengaruh dan kembali mengklaim statusnya sebagai kekuatan dunia.

Melalui politik luar negerinya, Tiongkok berusaha untuk menerapkan mentalitas dan identitas sebagai Negeri Tengah ke berbagai negara, terkhusus dalam hal ini Taiwan. Berbagai alasan moral dan identitas sebagai satu kesatuan, dengan termasuk dalam salah satu prinsip tiga harmoni yaitu *he-jie* “penyatuan dengan Taiwan”, dimana mendasari kuatnya hubungan dengan Taiwan.

Determinasi paling signifikan Tiongkok dapat dirasakan di sektor diplomatik dengan memutus pengakuan negara-negara lain misalnya di Afrika dalam FOCAC, negara Amerika Latin dalam CELAC terhadap Taiwan, serta forum kerjasama lain di kawasan pasifik, serta dominasi Tiongkok atas Taiwan dalam Forum Kerjasama

Ekonomi ECFA. Seiring berkembangnya pengaruh Tiongkok telah memberi kontrol serta dominasi lebih luas. Pola hubungan serta dominasi atau kontrol secara implisit Tiongkok atas Taiwan adalah bentuk penerapan dari konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*), sebagaimana yang menjadi argumentasi utama dari skripsi ini.

Tindakan asertif dan provokatif dalam segi diplomatik, dengan mendorong negara-negara lain dengan bantuan untuk memutus hubungan dengan Taiwan.

Selain itu perilaku asertif dan provokatif lintas selat secara militeristik. Dominasi juga terjadi dalam Forum Kerjasama Ekonomi ECFA, hal ini sebagai salah satu cara untuk mengekang ekonomi Taiwan secara perlahan-lahan, sebab Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat dan besar.

Dalam bab ini telah menyediakan dasar-dasar yang dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana pola hubungan dan determinasi serta dominasi tersebut dapat diejawantahkan mencerminkan konsep Negeri Tengah (*Middle Kingdom*) melalui determinasi, khususnya keputusan diplomatik terhadap Taiwan melalui politik luar negeri Tiongkok yang akan dijelaskan di bab selanjutnya.